

## RINGKASAN

Penelitian dengan judul “Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap” bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan politik implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap serta mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan HIV dan AIDS yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat, terkhusus di Kecamatan Cilacap Selatan sendiri yang merupakan daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Cilacap. Maka munculah upaya untuk pencegahan dan menanggulangi persebaran HIV dan AIDS ini dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: *pertama*, pelaksanaan dari perda ini belum berjalan 100%, di mana dari dimulai terbentuknya perda pada tahun 2015 dan hingga sekarang masih ada yang belum dikerjakan dan baru akan mau mulai dikerjakan tahun ini. Dalam penerapannya, pengerjaan kelembagaupun justru loncat, dari KPA Kabupaten justru menggarap desa terlebih dahulu yang dengan alasan itu dilakukan agar pelaksanaannya menjadi lebih cepat, bahkan hingga saat ini Puskesmas Cilacap Selatan 1 belum bisa melakukan PDP, hanya Puskesmas Cilacap Selatan 2 saja yang sudah bisa melakukan PDP di tingkat Kecamatan, itupun Puskesmas Cilacap Selatan 2 sebenarnya sudah bisa melakukan PDP bahkan sebelum diberlakukannya perda. Bahkan kantor KPA Kabupaten Cilacap selalu terlihat kosong dan kurang terawat, bisa dilihat bahwa pembentukan dari KPA Kabupaten Cilacap ini seperti hanya untuk formalitas saja. Dinas Kesehatan sendiri juga kurang transparan dalam penjabaran alokasi dana anggaran untuk perda penanggulangan HIV dan AIDS ini dan sering mengalami kekosongan stok obat untuk ODHA dengan dosis yang dianjurkan *Kedua*, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sendiri kurang begitu efektif dalam penerapannya, seperti adanya miskomunikasi dan tidak memperjuangkan anggaran dana. Besaran nilai anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan rata-rata tiap tahun yang hanya mencapai angka 60-70 jutaan rupiah, masih dinilai kecil untuk memenuhi keperluan dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.

**Kata Kunci:** Politik Implementasi, Peraturan Daerah, Penanggulangan HIV dan AIDS.

## SUMMARY

*The study entitled “Political Implementation of Cilacap’s Regional Regulation Number 2 of 2015 about Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Prevention in the District of South Cilacap, Cilacap Regency” aims to know and describe the political implementation Cilacap’s Regional Regulation No. 2 of 2015 about HIV/AIDS Prevention in the District of South Cilacap, Cilacap Regency. As well as determine and describe the ability of Local Governments in implementing the Regional Regulation No. 2 of 2015 on HIV and AIDS in the District of Cilacap Selatan, Cilacap Regency. Cilacap regency is one of Regencies in Central Java, with special attention to the development of HIV and AIDS that show the tendency of more concern where the number of cases of HIV and AIDS continues to increase, especially in South Cilacap District own which is the area with the findings of cases of HIV/AIDS is the highest in the District of Cilacap. Then comes the effort for prevention and tackling the spread of HIV and AIDS with the establishment of Local Regulation Kabupaten Cilacap about HIV and AIDS in the District of Cilacap.*

*The results of this study explain that: first, the implementation of this regulation has not been running 100%, where from the beginning the formation of local regulation in the year 2015 and until now is still there that has not been done and the new will want to start done this year. In its application, workmanship kelembagaannya quite the jump, from KPA District actually working on the village first with the reason it is done so that its implementation becomes faster, even up to the current health center Cilacap Selatan 1 can not perform the PDP, only the health center of South Cilacap 2 who can do PDP at the District level, and even then the health center of South Cilacap 2 can actually do the PDP even before the enactment of the regulation. Even the office of the KPA Kabupaten Cilacap always looks empty and poorly maintained, it can be seen that the formation of the KPA Kabupaten Cilacap such as only for formality. The department of Health itself is also less transparent in the translation of the allocation of budget funds to the local regulation on HIV and AIDS and often experience the emptiness of the stock of drugs for people living with hiv with the recommended dose of the Second, the Local Government of Cilacap Regency itself is less effective in its application, such as the presence of miscommunication and not fight for budget funds. The magnitude of the value of the budget spent by the Regional Government of Cilacap District with average every year that only reached 60-70 millions of dollars, is still considered small to meet the needs in the implementation of policy on HIV and AIDS.*

**Keywords:** Political Implementation, Regional Regulation, HIV and AIDS Prevention.